

**Aulia Nurdiyana**

D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa, [aulia.nurdiyana@gmail.com](mailto:aulia.nurdiyana@gmail.com)

**Mispiyanti, S.E., Ak., M.Ak., CA**

D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa, [mispiyanti@gmail.com](mailto:mispiyanti@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil), dan Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan Rasio Efektivitas terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 23 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Rasio Efektivitas tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan, dan Belanja Modal

### **Abstract**

*This study aimed to determine the effect of Local Own Income, Balancing Funds (General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds), and Financial Performance which is proxied by the Effectiveness Ratio of District / City Capital Expenditures in Central Java Province. This study used the secondary data Regional Budget Realization Report from 2017 to 2019. The hypothesis testing in this study uses multiple linear regression with the help of SPSS 23 for Windows. The results showed that Local Own Income, General Allocation Funds, and Profit Sharing Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditure. Meanwhile, the Special Allocation Fund and the Effectiveness Ratio have no effect on Capital Expenditure.*

**Keywords:** Local Own Income, Balancing Funds, Financial Performance, and Capital Expenditures

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah (Halim dan Damayanti, 2012: 23). Menurut Mardiasmo (2018: 12), salah satu aspek pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, salah satunya ditunjukkan dengan alokasi belanja modal yang relatif rendah. Belanja modal digunakan dalam rencana pembangunan jangka menengah dengan tujuan pemerintah pusat memberi target rata-rata belanja modal kepada pemerintah daerah setiap tahunnya.

Berdasarkan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017, total belanja APBD tahun

2017 sebesar 1.052,6 triliun rupiah dengan proporsi terbesar adalah belanja pegawai (38,5%), belanja barang dan jasa sebesar 22,2%, belanja modal sebesar 21,1%, dan belanja lainnya sebesar 18,2%. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD. Semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung belanja yang efektif guna mendorong roda perekonomian daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah pusat memberikan target rata-rata belanja modal kabupaten/kota sebesar 30% dari total belanja daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan pembangunan daerah. Berdasarkan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah tahun 2017, rasio belanja modal secara nasional adalah 21,1%. Berdasarkan wilayah, Kalimantan merupakan wilayah dengan porsi belanja modal tertinggi yaitu mencapai 23,3% dari keseluruhan belanja daerah. Adapun porsi belanja modal terendah adalah Jawa yang hanya 20,4%.

Daerah dengan porsi belanja modal terkecil berturut-turut adalah daerah se-provinsi Jawa Barat (15,4%), daerah se-provinsi Jawa Tengah (15,8%), dan daerah se-provinsi Jawa Timur (17,4%). Fenomena ini menunjukkan bahwa belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih berada di bawah target rata-rata nasional. Penyusunan belanja modal pada pemerintah daerah bisa dipengaruhi faktor keuangan maupun non keuangan. Namun pada penelitian ini berfokus pada faktor keuangan, antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil) serta kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio efektivitas.

Belanja modal dapat memenuhi target sebesar 30%, apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah besar. Apabila PAD semakin besar, maka suatu daerah dikatakan mandiri. Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari bagaimana daerah tersebut mampu dalam mengelola keuangan yang ditandai dengan semakin kuatnya kapasitas keuangan di suatu daerah. Oleh karena itu, suatu daerah tersebut tidak semestinya tergantung pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan provinsi yang disalurkan melalui dana perimbangan. Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Besarnya pendapatan asli suatu daerah dapat mengakibatkan peningkatan belanja modal. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tepat dalam mengalokasikan dana tersebut menjadi belanja suatu daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sukmaji dan Rohman, 2019).

Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar-besarnya sehingga belanja modal akan meningkat dengan tujuan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut semakin baik. Semakin besar PAD yang diterima maka akan meningkatkan belanja modal.

Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam membiayai kegiatan operasional. Perbedaan kemampuan tersebut, menyebabkan pemerintah pusat

berupaya untuk memberikan bantuan berupa dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Kemampuan suatu daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur dengan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Salah satu rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan rasio efektivitas terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Belanja Modal**

Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud (Afiah *et al.*, 2020: 63).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah (Banga, 2017: 91).

### **Dana Alokasi Umum**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Fungsi dana alokasi umum sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal dengan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

### **Dana Alokasi Khusus**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

### **Dana Bagi Hasil**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **Rasio Efektivitas**

Menurut Faud (2016: 138), kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menghitung rasio keuangan pemerintah daerah. Salah satu rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas. Menurut Faud (2016: 140), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintahan daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

## **METODE**

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari *website* [www.djpk.kemenkeu.go.id/](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/). Sumber data yang digunakan berupa laporan realisasi anggaran tahun 2017-2019.

### **Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah belanja modal.

### **Populasi dan sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35, dalam kurun waktu 3 tahun sehingga berjumlah 105. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh sehingga keseluruhan populasi dalam penelitian digunakan sebagai subjek penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu

kesimpulan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah:

#### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017: 199).

#### **2. Uji Asumsi Klasik**

Menurut Gudono (2012: 147), uji asumsi klasik sering disebut dengan analisis residual karena penelitian mengenai pelanggaran terhadap asumsi klasik biasanya dilakukan dengan mengamati pola nilai residual. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

##### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016: 154). Salah satu cara untuk melihat normalitas yaitu dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Apabila nilai  $\text{sig} > 0,05$  maka data terdistribusi normal. Sebaliknya, Apabila nilai  $\text{sig} < 0,05$  maka data tidak terdistribusi secara normal.

##### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016: 103). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  dan nilai  $\text{VIF} \leq 10$ , maka model regresi dikatakan baik dan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

##### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2016: 134), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

##### **d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model regresi (Basuki dan Prawoto, 2016: 60). Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Menurut Ghozali (2016: 116), salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya korelasi dapat dilakukan uji *Durbin-Watson*.

Jika nilai *Durbin-Watson* terletak antara  $dl$  dan  $du$  atau di antara  $(4-du)$  dan  $(4-dl)$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Namun, apabila terjadi autokorelasi dapat digunakan salah satu metode untuk mengatasi autokorelasi yaitu metode *Cochrane-Orcutt*.

Menurut Aprianto (2020), metode *Cochrane-Orcutt* merupakan metode yang digunakan untuk perbaikan bila suatu model regresi ditemukan gejala autokorelasi. Ketika struktur autokorelasi tidak diketahui, maka mencari nilai  $p$  (koefisien autokorelasi) terlebih dahulu, kemudian dilakukan transformasi (Lag).

### 3. Uji Hipotesis

Menurut Sulistiani (2020: 44), uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan terkontrol, maupun observasi (tidak terkontrol). Pada penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan analisis yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen (Bahri, 2018: 195).

#### b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Menurut Mulyanto dan Wulandari (2010: 183), uji  $t$  digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas  $t$  hitung (nilai Sig  $t$ ) dari masing-masing variabel bebas pada taraf uji  $\alpha = 0,05$ . Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel independen secara individual dan signifikan berpengaruh terhadap variabel independen.

#### c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Mulyanto dan Wulandari (2010: 182), uji  $F$  digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen atau menjelaskan kemampuan variabel independen secara bersama-sama dalam menerangkan variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas  $F$  hitung (nilai Sig  $F$ ) dari seluruh variabel bebas pada taraf uji  $\alpha = 0,05$ . Apabila nilai  $F$  hitung  $< 0,05$  maka variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel independen.

#### d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Bahri (2018: 192), koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen atau dapat dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel

independen terhadap variabel dependen. Besarnya nilai  $R^2$  adalah  $0 \leq R^2 \leq 1$ , apabila nilai  $R$  mendekati 1 artinya variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan model semakin tepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel IV.1 Descriptive Statistic**

| Descriptive Statistics |     |                     |                      |                       |                        |
|------------------------|-----|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                        | N   | Minimum             | Maximum              | Mean                  | Std. Deviation         |
| PAD                    | 105 | 179224408<br>698.00 | 206633341<br>8588.00 | 396789408<br>248.0762 | 277889879<br>001.34090 |
| DAU                    | 105 | 440041244<br>000.00 | 143703623<br>9000.00 | 971726589<br>550.2858 | 248994624<br>943.49680 |
| DAK                    | 105 | 564523090<br>00.00  | 477533051<br>326.00  | 290095538<br>332.3427 | 106128643<br>569.90868 |
| DBH                    | 105 | 188654610<br>39.00  | 246044588<br>085.00  | 460450231<br>69.4476  | 413359077<br>71.83254  |
| RE                     | 105 | 16.37               | 180.18               | 117.7525              | 23.03726               |
| BM                     | 105 | 113622507<br>976.00 | 127535908<br>8966.00 | 398901632<br>199.7142 | 181910918<br>683.06396 |
| Valid N (listwise)     | 105 |                     |                      |                       |                        |

Sumber: Data yang diolah, 2020

#### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 179.224.408.698 yang dimiliki oleh Kota Pekalongan pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 2.066.333.418.588 yang dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2019. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai standar deviasi sebesar 277.889.879.001,34 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) sebesar 396.789.408.248,08 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

#### Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar 440.041.244.000 yang dimiliki oleh Kota Magelang pada tahun 2017 dan 2018 dan nilai maksimum sebesar 1.437.036.239.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2019. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai standar deviasi sebesar 248.994.624.943,50 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) sebesar 971.726.589.550,29 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

#### Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar 56.452.309.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang pada tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar

477.533.051.326 yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2018. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai standar deviasi sebesar 106.128.643.569,91 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) sebesar 290.095.538.332,34 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

#### Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai minimum sebesar 18.865.461.039 yang dimiliki oleh Kota Salatiga pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 246.044.588.085 yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus pada tahun 2017. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai standar deviasi sebesar 41.335.907.771,83 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) sebesar 46.045.023.169,45 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

#### Rasio Efektivitas (RE)

Rasio Efektivitas (RE) memiliki nilai minimum sebesar 16,37% yang dimiliki oleh Kota Surakarta pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 180,18% yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2017. Rasio Efektivitas (RE) memiliki nilai standar deviasi sebesar 23,04% lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) sebesar 117,75% menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

#### Belanja Modal (BM)

Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum sebesar 113.622.507.976 yang dimiliki oleh Kota Tegal pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 1.275.359.088.966 yang dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2017. Belanja Modal (BM) memiliki nilai standar deviasi sebesar 181.910.918.683,06 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) sebesar 398.901.632.199,71 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

### Uji Normalitas

**Tabel IV.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test |                |                         |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                                    |                | Unstandardized Residual |
| N                                  |                | 105                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>   | Mean           | .0000000                |
|                                    | Std. Deviation | .24318908               |
| Most Extreme Differences           | Absolute       | .077                    |
|                                    | Positive       | .045                    |
|                                    | Negative       | -.077                   |
| Test Statistic                     |                | .077                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)             |                | .146 <sup>c</sup>       |

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.3 tersebut, menunjukkan besarnya nilai signifikansi Asym. Sig. (2-tailed) sebesar 0,146 > 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, dapat disimpulkan bahwa data

berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel IV.3 Hasil Pengujian Multikolinearitas**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                         |       |
|---------------------------|------------|-------------------------|-------|
| Model                     |            | Collinearity Statistics |       |
|                           |            | Tolerance               | VIF   |
| 1                         | (Constant) |                         |       |
|                           | LN_PAD     | .434                    | 2.304 |
|                           | LN_DAU     | .211                    | 4.749 |
|                           | LN_DAK     | .307                    | 3.260 |
|                           | LN_DBH     | .802                    | 1.247 |
|                           | RE         | .948                    | 1.055 |

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.4 tersebut, terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan rasio efektivitas memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel IV.4 Hasil Pengujian Glejser**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |        |      |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------|------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | t      | Sig. |
|                           |            | B                           | Std. Error |        |      |
| 1                         | (Constant) | 2.036                       | 1.326      | 1.536  | .128 |
|                           | LN_PAD     | -.102                       | .052       | -1.970 | .052 |
|                           | LN_DAU     | .025                        | .098       | .250   | .803 |
|                           | LN_DAK     | -.021                       | .049       | -.438  | .662 |
|                           | LN_DBH     | .032                        | .029       | 1.1119 | .266 |
|                           | RE         | .000                        | .001       | -.326  | .745 |

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk masing-masing variabel independen lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

### Uji Autokorelasi

**Tabel IV.5 Hasil Pengujian Autokorelasi Sebelum Menggunakan Metode Cochrane-Orcutt**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .806 <sup>a</sup> | .649     | .631              | .24942                     | .909          |

a. Predictors: (Constant), RE, LN\_PAD, LN\_DAK, LN\_DBH, LN\_DAU

b. Dependent Variable: LN\_BM

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.6, menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 0,909. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel ( $n$ ) = 105 dan jumlah variabel independen ( $k$ ) = 5. Nilai Durbin-Watson 0,909 lebih kecil dari batas atas ( $du$ ) 1,7827 dan lebih kecil dari 2,2173 ( $4-du$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengujian Durbin-Watson ditolak dan terdapat gejala autokorelasi.

Oleh karena itu, digunakan metode Cochrane-Orcutt untuk mengobati uji autokorelasi dengan memasukkan nilai  $\rho$  (koefisien autokorelasi), lalu transform menggunakan Lag.

**Tabel IV.6 Nilai  $\rho$  (koefisien autokorelasi)**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            |
|                           |            | B                           | Std. Error |
| 1                         | (Constant) | -.006                       | .020       |
|                           | Lag_Res1   | .528                        | .082       |

**Tabel IV.7 Hasil Pengujian Autokorelasi Setelah Menggunakan Metode Cochrane-Orcutt**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .795 <sup>a</sup> | .631     | .613              | .20599                     | 1.832         |

a. Predictors: (Constant), Lag\_RE, Lag\_LN\_DAU, Lag\_LN\_DBH, Lag\_LN\_DAK, Lag\_LN\_PAD

b. Dependent Variable: Lag\_LN\_BM

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.8 tersebut, menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,832. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel ( $n$ ) = 105 dan jumlah variabel independen ( $k$ ) = 5. Nilai Durbin-Watson 1,832 lebih besar dari batas atas ( $du$ ) 1,7827 dan lebih kecil dari 2,2173 ( $4-du$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengujian Durbin-Watson diterima, sesuai dengan kategori yang terdapat pada tabel keputusan Durbin-Watson sehingga pada model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

### Analisis Regresi Berganda

**Tabel IV.8 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            |
|                           |            | B                           | Std. Error |
| 1                         | (Constant) | -3.203                      | 1.365      |
|                           | Lag_LN_PAD | .343                        | .099       |
|                           | Lag_LN_DAU | .801                        | .166       |
|                           | Lag_LN_DAK | -.071                       | .073       |
|                           | Lag_LN_DBH | .167                        | .053       |
|                           | Lag_RE     | 2.892E-5                    | .001       |

Berdasarkan tabel IV.9 tersebut diperoleh hasil estimasi model dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = -3,203 + 0,343 \text{ PAD} + 0,801 \text{ DAU} - 0,071 \text{ DAK} + 0,167 \text{ DBH} + 0,00002892 \text{ RE} + e$$

Dari penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar -3,203 menyatakan bahwa pada saat variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan rasio efektivitas bernilai 0, maka belanja modal bernilai -3,203.
- Nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah 0,343 menjelaskan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan belanja modal ( $Y$ ) sebesar 0,343 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.
- Nilai koefisien variabel dana alokasi umum 0,801 menjelaskan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel dana alokasi umum ( $X_2$ ) dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan belanja modal ( $Y$ ) sebesar 0,801 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.
- Nilai koefisien variabel dana alokasi khusus -0,071 menjelaskan bahwa setiap terjadi penurunan pada variabel dana alokasi umum ( $X_3$ ) dalam satu satuan, maka dapat menurunkan belanja modal ( $Y$ ) sebesar 0,071 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.
- Nilai koefisien variabel dana bagi hasil 0,167 menjelaskan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel dana bagi hasil ( $X_4$ ) dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan belanja modal ( $Y$ ) sebesar 0,167 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.
- Nilai koefisien variabel rasio efektivitas 0,00002892 menjelaskan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel rasio efektivitas ( $X_5$ ) dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan belanja modal ( $Y$ ) sebesar 0,00002892 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah tetap.

### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

**Tabel IV.9 Hasil Uji t**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |        |      |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------|------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | t      | Sig. |
|                           |            | B                           | Std. Error |        |      |
| 1                         | (Constant) | -3.571                      | 2.393      | -1.493 | .139 |
|                           | LN_PAD     | .380                        | .093       | 4.082  | .000 |
|                           | LN_DAU     | .609                        | .177       | 3.430  | .001 |
|                           | LN_DAK     | -.015                       | .088       | -.169  | .866 |
|                           | LN_DBH     | .150                        | .051       | 2.918  | .004 |
|                           | RE         | .000                        | .001       | .298   | .767 |

a. Dependent Variable: LN\_BM

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.10, hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa tiga variabel yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu dana alokasi khusus dan rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut:

**a. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal**

Berdasarkan tabel IV.10, variabel pendapatan asli daerah mempunyai nilai koefisien sebesar 4,082 (positif) dan nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian, semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima maka belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah semakin besar.

**b. Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal**

Berdasarkan tabel IV.10, variabel dana alokasi umum mempunyai nilai koefisien sebesar 3,430 (positif) dan nilai probabilitas sebesar  $0,001 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian, semakin besar dana alokasi umum yang diterima maka belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah semakin besar.

**c. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal**

Berdasarkan tabel IV.10, variabel dana alokasi khusus mempunyai nilai koefisien sebesar -0,169 (negatif) dan nilai probabilitas sebesar  $0,866 > 0,05$ . Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemberian dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

**d. Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal**

Berdasarkan tabel IV.10, variabel dana bagi hasil mempunyai nilai koefisien sebesar 2,918 (positif) dan nilai probabilitas sebesar  $0,004 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian, semakin besar dana bagi hasil yang diterima maka belanja modal

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah semakin besar.

**e. Pengaruh rasio efektivitas terhadap belanja modal**

Berdasarkan tabel IV.10, variabel rasio efektivitas mempunyai nilai koefisien sebesar 0,298 (positif) dan nilai probabilitas sebesar  $0,767 > 0,05$ . Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

**Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

**Tabel IV.10 Hasil Pengujian Simultan**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |     |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df  | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 11.385         | 5   | 2.277       | 36.602 | .000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 6.159          | 99  | .062        |        |                   |
|                    | Total      | 17.543         | 104 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: LN\_BM

b. Predictors: (Constant), RE, LN\_PAD, LN\_DAK, LN\_DBH, LN\_DAU

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.11 diperoleh Fhitung sebesar 36,602 dengan tingkat signifikansinya sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel IV.11 Pengujian Koefisien Determinasi**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .806 <sup>a</sup> | .649     | .631              | .24942                     | .909          |

a. Predictors: (Constant), RE, LN\_PAD, LN\_DAK, LN\_DBH, LN\_DAU

b. Dependent Variable: LN\_BM

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.12 hasil tampilan output model summary menunjukkan bahwa besarnya Adjusted R Square adalah 0,631, hal ini berarti bahwa 63,1% yang menunjukkan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan rasio efektivitas. Sedangkan sisanya sebesar 36,9% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.
2. Variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum yang diperoleh, maka semakin tinggi juga belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak mampu meningkatkan belanja modal karena pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah sudah dapat memenuhi kebutuhan belanja modalnya dengan menggunakan dana alokasi umum dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat dalam pembangunan sarana dan prasarana.
4. Variabel dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana bagi hasil yang diperoleh, maka semakin tinggi juga belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Variabel rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat cenderung diabaikan maka pengalokasikan belanja modal tidak terealisasi dengan efektif dan dapat menghambat pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Anggaran daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik sebagian besar dibelanjakan untuk belanja pegawai, sehingga pemerintah perlu melakukan reservasi dan identifikasi ulang terhadap jumlah

kebutuhan alokasi dana dari seluruh kegiatan secara lebih akurat dan detail sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik.

2. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen lain yang dapat memengaruhi belanja modal berupa kinerja keuangan pemerintah daerah seperti rasio-rasio lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiah, N. N., S. Mulyani, dan A. Alfian. 2020. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua pada Entitas Akuntansi. Kencana. Jakarta.
- Aprianto, A., N. N. Debatara, dan N. Imro'ah. Metode Cochrane-Orcutt untuk Mengatasi Autokorelasi pada Estimasi Parameter Ordinary Least Squares (2020). Buletin Ilmiah Mat, Stat, dan Terapannya (Bimaster) 9(1): 95-102.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bappenas. Jakarta.
- Bahri, S. 2018. Metodologi Penelitian Bisnis: Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS. Andi. Yogyakarta.
- Banga, W. 2017. Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Basuki, A. T. dan N. Prawoto. 2016. Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Faud, M. R. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Cetakan delapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gudono. 2012. Analisis Data Multivariat. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yogyakarta.
- Halim, A. dan T. Damayanti. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Hairiyah, L. Malisan, dan Z. Fakhroni. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen 14(2): 85-91.
- <https://www.bps.go.id/>. Diakses pada 30 September 2020. Pukul 13:00.
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Diakses pada 29 September 2020. Pukul 10:00.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Terbaru). Andi. Yogyakarta.
- Mulyanto, H. dan A. Wulandari. 2010. Penelitian: Metode & Analisis. Agung. Depok.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Manajemen. Cetakan 6. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Cetakan delapan. Alfabeta. Bandung.
- Sukmaji, D. D. dan A. Rohman. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting* 8(4): 1-9.
- Sulistiani, E. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. LTA. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa. Kebumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438. Jakarta.